

**PRAKTEK PELAKSANAAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN
SYARIAH KENDAL PERMAI (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSN-
MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)).**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

NIKA RAHMAWATI
1402036108

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hainka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Fax 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr/i Nika Rahmawati
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami
kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nika Rahmawati
Nim : 1402036103
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Ganti Rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal
Permai (Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004
Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Drs. H. Muhiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 188303 1003

Semarang, Juli 2019
Pembimbing II

AITMAD MUNIR, M.Si
NIP. 19860306 201503 100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nika Rahmawati
NIM : 1402036108
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Pelaksanaan Ganti Rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)).

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal : 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag

NIP. 196910311995031002

Penguji Utama I

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

Drs. MUHYIDDIN, M.Ag.

NIP. 195502281983031003

Sekretaris Sidang

SUPANGAT, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji Utama II

M. HARUN, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

AHMAD MUNIF, M.Si

NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT Penulis mempersembahkan
skripsi ini untuk:

Keluargaku:

Untuk bapak dan ibu tersayang

Bapak Roni Samuri dan Ibu Khomsatun

Yang selalu membuat diri ini termotivasi untuk pantang menyerah dalam belajar
sehingga dapat menyelesaikan studi S1 dan yang sampai detik ini telah
memberikan yang terbaik, nasehat, arahan dan doa-doa yang selalu mengiringi
setiap langkahku.

Untuk kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku

Yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat untuk terus berjuang dalam
proses penyelesaian skripsi ini.

Kalian adalah anugerah terindah yang kumiliki.

Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Islam 2014 khususnya
MUC 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulis.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator



Nika Rahmawati
NIM. 1402036087

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesat di era modern ini. Salah satunya dengan munculnya Pegadaian Syariah dengan perkembangan yang terus menerus sampai saat ini. Pegadaian Syariah dalam operasionalnya tidak terlepas dari resiko kerugian salah satunya nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran. Dengan adanya resiko kerugian tersebut maka diberlakukan adanya ganti rugi (*Ta'widh*) yang juga sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk *Amanah* melalui akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kendal Permai, serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Hukum Islam terhadap praktek ganti rugi (*Ta'widh*) melalui akad *Rahn* pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Kendal Permai.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada dalam ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dikarenakan Pegadaian Syariah dalam menerapkan besarnya biaya ganti rugi (*Ta'widh*) kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan ganti rugi (*Ta'widh*) yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), lembaga keuangan syariah dalam penerapan ganti rugi (*Ta'widh*) harus benar-benar atas kerugian riil yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas dan besarnya ganti rugi (*Ta'widh*) tidak boleh dicantumkan dalam akad. Sehingga dengan penggunaan rumus ganti rugi (*Ta'widh*) menunjukkan bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam perhitungan besarnya kerugian yang dialami pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Kendal Permai.

Kata kunci: akad *rahn*, *ta'widh*, fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan Rahmat-Nya telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta nikmat kesehatan, rezeki, kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTEK PELAKSANAAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*))”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi agung Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul Qiyamah nanti. Amin ya rabbal'amin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

3. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Supangat M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, MSI. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan semangat untuk menulis skripsi ini.
6. Teman mahasiswa semua, mahasiswa jurusan Muamalah angkatan 2014 umumnya, khususnya kelas MUC 2014 terima kasih atas kerjasama, semangat dan motivasinya.
7. Bapak Nandang Hermawan selaku pengelola Pegadaian Syariah Kendal Permai yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan “jazakumullah Khairan Katsiran” kepada mereka semua yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini, penulis sangat harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin.

Semarang, 26 Juli 2019

Nika Rahmawati
NIM. 1402036087

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN DEKLARASI | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | vii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan manfaat penelitian | 7 |
| D. Telaah pustaka | 8 |
| E. Metodologi penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II KONSEP RAHN DAN GANTI RUGI (TA'WIDH) | |
| A. Pengertian <i>Rahn</i> | 18 |
| B. Dasar Hukum <i>Rahn</i> | 19 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> | 22 |
| D. Macam-Macam <i>Rahn</i> | 27 |
| E. Pengertian Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) | 30 |
| F. Syarat-Syarat Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) | 33 |
| G. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Menurut Fatwa DSN-MUI | 34 |

| | |
|---|----|
| H. Landasan Hukum Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)..... | 36 |
| I. Pendapat Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) | 41 |
| BAB III PELAKSANAAN GANTI RUGI (<i>TA'WIDH</i>) DI PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI | |
| A. Profil Pegadaian Syariah Kendal Permai | 44 |
| B. Praktek Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai..... | 55 |
| BAB IV ANALISIS GANTI RUGI (<i>TA'WIDH</i>) DI PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI | |
| A. Analisis Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Kendal Permai | 63 |
| B. Analisis Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Terhadap Praktek Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Kendal Perma | 66 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran-Saran | 79 |
| C. Penutup | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan dan perubahan zaman, kehidupan manusia dihadapkan dengan segala bentuk kebutuhan yang sekiranya dapat menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Salah satunya kegiatan bertransaksi. Dengan transaksi kita mengenal dengan namanya jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, dan masih banyak lagi bentuk transaksi lainnya.

Seperti halnya Pegadaian, Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan secara kredit kepada masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh pihak yang mempunyai utang kepada pihak piutang. Seseorang yang mempunyai utang memberikan kuasanya kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut dalam melunasi utang apabila seseorang yang berpiutang tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi pada sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.² Sedangkan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 297.

² M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012), hlm. 217.

lembaga Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak lembaga. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman.³

Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat dalam pengadaan dengan adanya sebuah jaminan. Selain itu Pegadaian Syariah pun memiliki beberapa produk berbasis syariah yang lainnya di luar gadai emas, yang sekiranya sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam kebutuhan transaksi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk aspek produk yaitu pembiayaan, emas dan jasa atau pelayanan.

Sedangkan definisi akad *ar-Rahn* menurut istilah syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.⁴ Gadai atau *al-Rahn* (الرهن) merupakan harta jaminan hutang yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, jika penghutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran. Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah perjalanan.⁵ Praktek seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw sendiri pernah melakukannya. Sesuai dengan Al-Hadits dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:

³ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonom Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 68.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.

⁵Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 264.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”⁶ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits Rasulullah tersebut dapat di ketahui bahwasanya Rasulullah Saw pernah melakukan akad gadai pada zamannya. Gadai disini fungsinya untuk mengatasi masalah pada setiap permasalahan keuangan manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.⁷

Pada Pegadaian Syariah Kendal Permai terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah salah satunya produk *Amanah*. Produk *Amanah* ini merupakan produk khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendara seperti membeli sepeda motor atau mobil dengan ketentuan yang telah berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara berangsur. Dalam pembiayaan produk *Amanah* menggunakan akad *Rahn Tasjily* dan pelunasannya dapat diangsur selama beberapa bulan, diantaranya Pegadaian Syariah Kendal Permai memberikan opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan.

⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103.

⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kendal Permai sebagai *Murahin* kepada nasabahnya sebagai *Rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad secara estimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁸ Pembiayaan ini sangat unik sekali dimana pembiayaan yang hanya disediakan bagi pegawai dan pengusaha mikro diproduksi dengan syarat yang mudah dan ketentuan yang terjangkau.

Untuk mendapatkan produk *Amanah*, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, melaporkan kelengkapan : fotokopi KTP (suami atau isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap, Slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi *Amanah*, membayar uang muka yang telah disepakati (minimal 10% untuk sepeda motor dan 20% untuk mobil), menandatangani akad *Amanah*.

Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam Islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik antara penerima barang (*Murtahin*) atau pemilik barang (*Rahin*), sehingga tidak ada yang dizalimi satu sama lain. Resiko yang dihadapi seperti halnya adanya *wanprestasi* atau kelalaian *Rahin* dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariat Islam yang sangat melindungi

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 80.

semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satunya bentuk perlindungan yang ada dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme ganti rugi (*Ta'widh*) kepada pihak hak-haknya yang dilanggar.

Kata *al-ta'widh* berasal dari *'iwadha* (عوض) yang berarti ganti.

Sedangkan *al Ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.⁹ Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas, ataupun manfaatnya.

Namun, dalam pelaksanaan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kendal Permai terdapat pembayaran ganti rugi (*Ta'widh*) *Rahin* terhadap *Murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Ganti rugi (*Ta'widh*) tersebut dikenakan perhari setelah jatuh tempo keterlambatan dan berlaku *continue* pada hari selanjutnya, jika nasabah belum juga menunaikan kewajiban bayarnya kepada Pegadaian Syariah Kendal Permai yang jumlah besarnya sudah ditentukan didalam isi perjanjian.¹⁰ Sebagaimana isi perjanjiannya :

1. Apabila *Rahin* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) yang besarnya seperti pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini.

⁹ Wahbah al-zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm 87 Dikutip Melalui Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004" Dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 248.

¹⁰Nandang Hermawan, Wawancara, (Kantor wilayah Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 17 Oktober 2018)

2. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan ganti rugi per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan.
3. Ganti rugi (*ta'widh*) dibayar bersamaan dengan angsuran dan biaya pemeliharaan marhun.¹¹

Dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) menyebutkan bahwa besaran ganti rugi (*Ta'widh*) hanya dapat dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhai'ah*).

Dalam praktiknya ternyata biaya ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai sudah diketahui nilai kerugiannya dengan mengacu pada ketentuan yang sudah ada didalam surat perjanjian. Dengan demikian, biaya ganti rugi (*Ta'widh*) yang harus dibayar oleh nasabah sudah dapat diketahui besaran nominalnya sejak awal

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses ganti rugi (*Ta'widh*) sendiri dan aplikasinya dalam Pegadaian Syariah pada produk *Amanah*. Oleh karena itu penulis memilih judul: **“PRAKTIK PELAKSANAAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT KENDAL PERMAI (Perspektif DSN-MUI No.46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*))”**.

¹¹Isi surat perjanjian di Pegadaian Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk *Amanah* melalui akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) melalui akad *Rahn* pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek ganti rugi (*Ta'widh*) melalui akad *Rahn* pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) melalui akad *Rahn* pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademisi, dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga sebagai wawasan untuk menambah informasi tentang hal-hal berkaitan dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan tentang kemuamalahan dan menerapkan Fatwa DSN –MUI sebagai rujukan bagi Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan agar adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Pegadaian Syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini untuk menghindari pengulangan (*duplication*) yang tidak disengaja dari penelitian-penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidiki. Disamping itu memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Oleh karena itu kita menguasai informasi mengenai subjek tersebut.¹²

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian, maka diperlukan adanya wacana pembahasan penelitian atau pengetahuan-pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang serupa dengan tema yang sama yaitu mengenai ganti rugi (*Ta'widh*) diantaranya:

Pertama, skripsi yang pernah disusun oleh Miftah Farid, 2013, *“Implementasi Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh (Studi Kasus Terhadap Penentuan Ta'widh Pada Produk Hasanah Card Di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)”*. Skripsi ini menekankan

¹² Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI. Press, 1993), hlm. 31-32.

pada denda bagi nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran tagihannya. *Ta'widh* yang ditetapkan yaitu dengan cara menetapkan berdasarkan jangka waktu keterlambatan dan bukan berdasarkan kerugian riil yang terjadi.¹³

Kedua, skripsi yang pernah disusun oleh Zumrotul Azizah, 2017 “*Sistem Pengelolaan Dana Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus*”. Skripsi ini menekankan pada pengalokasian dana *ta'widh*. Besaran *ta'widh* pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus ditentukan ketika awal akad dan dana yang terkumpul dari dana *ta'widh* dimasukan kedalam dana sosial atau dana CSR (*corporate social responsibility*) yang kemudian dialokasikan dalam kegiatan sosial seperti halnya memberikan sumbangan-sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan.¹⁴

Ketiga, skripsi yang pernah disusun oleh Abdullah Faqihuddin, 2017 “*Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya)*”. Skripsi ini menekankan bahwa pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Sedangkan implementasi *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya dalam kasus yang ada yaitu Bank BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara

¹³ Miftah Faridh, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh (Studi Kasus Terhadap Penentuan Ta'widh Pada Produk Hasanah Card Di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2013.

¹⁴ Zumrotul Azizah, *Sistem Pengelolaan Dana Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017.

kebijakan menerapkan *rescheduling*. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam kasus ini, sebenarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang seharusnya dikenakan sudah dilakukan dan dihitung kerugiannya, tetapi melihat dari niat nasabah yang masih mempunyai itikad baik dan juga nasabah dalam keadaan *force majeure* maka atas kebijakan dari Bank BNI Syariah, ganti rugi tersebut ditiadakan.¹⁵

Keempat, skripsi yang pernah disusun oleh Ivan Hidayani, "*Penentuan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank BJB Syari'ah KCP Sumedang*" Skripsi ini menekankan pada pemberian sanksi yang diberikan oleh Bank BJB Syari'ah KCP Sumedang kepada nasabah yang lalai terhadap pembayarannya berupa ganti rugi (*ta'widh*). Sehingga apabila dikaitkan hubungannya dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sesuai implementasinya dengan di lapangan. Seharusnya besarnya jumlah ganti rugi (*ta'widh*) tidak boleh dicantumkan didalam akad, tetapi pelaksanaannya dicantumkan dan dibuat sebelum perjanjian dibuat.¹⁶

Kelima, skripsi yang pernah disusun oleh Ani Nuraeni, "*Ganti Rugi Pada Pembatalan Jual Beli Rumah Pada Bum Panyawangan Bandung*". Skripsi ini menekankan pada jual beli rumah. Dimana pembeli harus

¹⁵Abdullah Faqihuddin, *Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya)*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

¹⁶Ivan Hidayani, *Penentuan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank BJB KCP Sumedang*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

membooking kavling terlebih dahulu dengan pembayaran minimal Rp. 5.000.000 disamping itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pembeli, apabila pembeli tidak memenuhinya dan memilih untuk tidak meneruskannya maka uang *booking* sebesar Rp. 5.000.000 menjadi hangus. Begitupun dengan konsumen yang mengundurkan diri karena alasan tertentu maka diharuskan membayar denda sebesar 50% x jumlah seluruh pembayaran yang telah disetorkan oleh konsumen kepada Developer.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dimana didalamnya membicarakan atau mempersoalkan tentang cara-cara melaksanakan penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode untuk proses pemecahan masalah dalam penulisan deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan gejala dan fakta di dalam kehidupan sosial (subjek atau objek) secara mendalam.¹⁹ Seperti penelitian saat ini terhadap pelaksanaan ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk *Amanah* yang memakai metode pendekatan studi lapangan pada Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai.

¹⁷Ani Nuraeni, *Ganti Rugi Pada Pembatalan Jual Beli Rumah Pada Bumi Panyawangan Bandung*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 1.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 20.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai Komplek Pertokoan Permai Blok B No 10, Patukangan, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311, dengan objek penelitian ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk *Amanah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari hasil pengamatan melalui pendekatan yang diarahkan pada pengamatan tersebut. Data kualitatif dalam penelitian memiliki kriteria data yang pasti, data yang terjadi sebagaimana adanya.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana subjek dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)²¹.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menunjang dalam melengkapi dari data primer dan diperoleh tidak dari data primer. Data sekunder ini dapat

²⁰Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 50.

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

berupa informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah utama dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah data. Tanpa mengetahui serta memahami teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak akan mendapatkan sebuah data yang dapat melengkapi suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kerjasama sebagai landasan utama dalam proses memahami.²² Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak nasabah dan karyawan untuk mengeksplorasi informasi secara jelas dari narasumber.

b. Dokumentasi (*documentation*)

Teknik pengumpulan data di Pegadaian Unit Kendal Permai dengan metode dokumenasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan

²²Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³ Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian menggunakan, dokumen, formulir produk *Amanah*, dokumen-dokumen lain dari Pegadaian Syariah Unit Kendal Permai. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. dalam penelitian ini yang menjadi sumber hukum primer adalah Fatwa DSN-MUI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Aturan-aturan yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini oleh penulis adalah dengan menggunakan hasil penelitian dan hasil karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁴

²³ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Rafika Ditama, 2014), hlm. 139.

²⁴ Ronny Hanitjo, *Metodolog Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya ke dalam temuan.²⁶ Setelah memperoleh semua data, maka peneliti akan mengumpulkan temuan-temuan di lapangan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh sesuai dengan arahan penelitian.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, terhadap data primer dan sekunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus berdasarkan pengamatan di lapangan untuk menilai apakah pelaksanaan *Ta'widh* pada produk pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Deskriptif analisis adalah metode yang dimulai dari membuat gambaran

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R &D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 334.

atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

JUDUL : Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Di Pegadaian Syariah Unit Kendal.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KONSEP *RAHN* DAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*)

Pada bab landasan teori berisi tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, macam-macam *rahn*, pengertian ganti rugi (*Ta'widh*), landasan hukum ganti rugi (*Ta'widh*), syarat-syarat ganti rugi, Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi (*Ta'widh*)

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R & D*.... hlm. 308

BAB III : PELAKSANAAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI

Pada bab kondisi umum objek penelitian ini berisi profil Pegadaian Syariah Kendal Permai Kendal dan praktek ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai.

BAB IV : ANALISIS GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI

Pada bab hasil penelitian ini berisi tentang analisi terhadap ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai dan analisis terhadap ganti rugi (*Ta'widh*) menurut Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi (*Ta'widh*)..

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP RAHN DAN GANTI RUGI (TA'WIDH)

A. Konsep

1. Definisi *Rahn*

Rahn secara bahasa artinya bisa *ats-tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap). Sedangkan definisi akad *Rahn* menurut syara' adalah menahan sesuatu karena adanya hak dan kemungkinan dari hak tersebut bisa terpenuhi sesuatu tersebut.¹

Menurut para ulama mengenai definisi *rahn* :

a. Menurut Syafi'iyah :

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ.

Artinya:

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”.

b. Menurut Hanafiyah:

أَمْوَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهٖ إِنْ تَعَدَّ رَاسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ.

Artinya:

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.²

c. Menurut Taqiyuddin:

جعل المال وثيقة بدین.

Artinya:

“Menjadikan harta sebagai jaminan”.

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106-107.

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) , hlm. 159-160.

Secara umum *Rahn* yaitu benda yang bernilai untuk dijadikan jaminan sebagai penguat hutang dan juga dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya.³

Menurut penulis *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum *Rahn*


Para ulama seepakat jika *Rahn* dipebolehkan, namun tidak wajib karena *Rahn* sebagai jaminan saja jika pihak *Rahin* (yang menyerahkan barang) dan *Murtahin* (penerima barang) tidak saling percaya.⁴ Adapun landasan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma', sebagai berikut:

a. Surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 92.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 161.

رَبِّهِ ^{قُلْ} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ^رءَاثِمٌ قَلْبُهُ ^{قُلْ}
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵

Ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang jaminan yang dipegang oleh orang yang memberi utang. Dalam dunia finansial, barang jaminan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau jaminan hutang.⁶

b. Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya:

*“Suatu ketika, Radulullah S.a.w. membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secaratunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”*⁷

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm 71.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 129.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, ..., hlm. 109.

- c. Hadits Nabu riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthuni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

Artinya:

*Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa telah bersabda Rasulullah saw., “tidak akan tertutup (hilang) barang gadaian dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia mendapatkan keuntungan dan ia juga menanggung kerugian” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim. Para perawinya tsiqat. Hanya saja menurut pendapat yang terpelihara pada sunan Abu Daud dan lainnya, hadits ini mursal).*⁸

- d. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi S.a.w. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (الْظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

*“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafqahnya apabila ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran nafqahnya apabila adalah ia tergadai, dan wajib orang yang nunggang dan yang meminum memberi nafqah”.*⁹

- e. Ijma'

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang

⁸ A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2006), hlm. 380.

⁹ A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani, ..., hlm. 380.

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada mereka.¹⁰

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rahn memiliki empat unsur yaitu *rahin* (pihak yang menggadaikan), *al-murtahin* (pihak yang menerima gadai), *al-marhun* (barang yang digadaikan), *al-marhun bih* (utang).¹¹

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* terdiri dari *ijab* dan *qabul* diantaranya *rahin* dan *murtahin*, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi tidak akan sempurna jika belum ada penyerahan jaminan.¹² Menurut ulama lain rukun *rah nada* tiga selain *ijab* dan *qabul*. Rukun tersebut adalah '*aqid* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang).¹³

Dalam menjalankan *rahn* pihak lembaga keuangan *Syariah* harus memenuhi unsur/rukun seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang sudah baligh, berakal, dapat dipercaya dan memiliki barang yang ingin di gadaikan.

b. *Al-Murtahin* (pihak yang menerima gadai)

Orang atau lembaga yang dipercaya *rahin* agar mendapatkan modal dengan jaminan.

c. *Al-Marhun* (barang jaminan)

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, ..., hlm. 111.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 162.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, .., hlm. 94.

Barang yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Dana yang diberikan kepada *muratahin* kepada *marhun* atas besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Shighat, Ijab dan Qabul*¹⁴

Semua orang yang melakukan akad *rahn* harus orang yang memenuhi syarat untuk melakukan akad. Selain *rahn* mempunyai rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi, maka *rahn* juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi diantaranya: ¹⁵

a. Persyaratan *Aqid*

Orang yang akan melakukan akad harus memenuhi *al-ahliyahnya*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang sah melakukan jual beli, yaitu berakal dan *mumayyi*, tetapi tidak harus *baligh*. Sedangkan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh yang sudah mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan *rahn*.¹⁶

Sedangkan menurut Hanafiyah adalah *ahliyyatul bai'* setiap orang boleh melakukan transaksi jual beli, maka untuk itu diperbolehkan melakukan akad *rahn*. Karena *rahn* merupakan tindakan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu orang

¹⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), hlm. 27.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., hlm. 21.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 162.

yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat seperti orang yang melakukan transaksi jual beli.¹⁷

b. Syarat *Shighat*

Menurut ulama Hanafiyah akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan jual beli. Sehingga jika akad dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal dan akadnya sah.¹⁸ Misal nya, orang yang menggadaikan hartanya mensyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum dibayar, sehingga pihak penggadaai dapat diperpanjang tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Kecuali jika itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.¹⁹

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang disyaratkan dalam akad *rahn* adalah:

- 1) Syarat sah yaitu mensyaratkan agar *murtahin* untuk segera membayar agar jaminan tidak disita.
- 2) Menyatakan yang tidak mempunyai manfaat, mensyaratkan hewan yang dijadikan jaminan untuk diberi makanan tertentu. Syarat yang seperti itu adalah syaratnya batal dan akadnya sah.
- 3) Syarat yang merusak akad, seperti syarat yang merugikan pihak *murtahin*, seperti *murtahin* tidak boleh menjual barang yang

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, ..., hlm. 112-113.

¹⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, ..., hlm. 38.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 78.

digadaikan setelah utang yang telah jatuh tempo sedangkan *rahin* belum juga membayar hutangnya.²⁰

c. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah kewajiban *rahin* untuk membayar utang kepada *murtahin* dan barang yang dijadikan jaminan harus yang bermanfaat agar sah dan dapat dihitung jumlahnya. Syarat *marhun bih* menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:²¹

- 1) *Marhun bih* hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, maksudnya *marhun bih* hendaknya berupa utang yang wajib diberikan oleh orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang atau benda.
- 2) *Marhun bih* berupa utang yang memungkinkan untuk dibayarkan, maksudnya jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, karena menyalahi maksud dan tujuan *rahn*.
- 3) Hak yang menjadi *marhun bih* harus jelas dan pasti, maksudnya tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.²²

Menurut ulama Syafi'iyah syarat *marhun bih* sebagai berikut:

- 1) Utang yang tetap dan bisa dimanfaatkan.
- 2) Utang harus sesuai pada saat akad.
- 3) Utang harus jelas dan *rahin* serta *murhatinnya* mengetahui.²³

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 163.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., hlm. 22.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, ..., hlm. 123-130.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 164.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang ditahan oleh *murtahin* sebagai jaminan hutang.²⁴ Ulama fiqih sepakat jika syarat *marhun* sebagaimana persyaratan barang jual beli, sehingga *marhun* dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.²⁵

- 1) Jaminan harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, jika jaminan tidak dapat mempunyai nilai dan tidak bermanfaat maka tidak bisa dijadikan jaminan menurut syariat Islam.
- 2) Jaminan bisa dijual dan jika dijual nilainya seimbang dengan utangnya.
- 3) Jaminan harus jelas dan bisa ditentukan secara spesifik.
- 4) Jaminan harus kepemilikan sah *rahin*.
- 5) Jaminan bukan milik orang lain.
- 6) Jaminan harus harta yang utuh, tidak boleh di beberapa tempat.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²⁶

Syarat *marhun* menurut ulama Hanafiyah sebagai berikut:

- 1) *Marhun* bisa dijual.
- 2) *Marhun* bermanfaat.
- 3) *Marhun* jelas.
- 4) *Marhun* milik *rahin* sendiri.
- 5) *Marhun* bisa diserahkan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., hlm. 22.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 164.

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., hlm. 22-23.

- 6) *Marhun* tidak bersatu dengan harta lain.
- 7) *Marhun* dapat dipegang dan dikuasai oleh *rahin*.
- 8) *Marhun* harta yang tetap dan bisa dipindahkan.²⁷

4. Macam-Macam *Rahn*

Rahn yang diatur menurut prinsip Syariah dibedakan atas dua macam, yaitu :

a. *Rahn Hiyazi*

Rahn Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan *rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut baangnya pun dikuasai oleh kreditur.²⁸

b. *Rahn 'iqar*

Rahn 'iqar atau *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasa (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikan diserahkan kepada *murtahin*.²⁹

Dalam Pegadaian Syariah pada produk *Amanah* menggunakan akad *Rahn Tsjily* yang disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi*. Produk *Rahn Tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang atau membantu masyarakat yang kurang

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 164.

²⁸ <https://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahn/> (Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019, Jam 19.34).

²⁹ Dikutip dari Fatwa DSN-MUI NO 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*, Dalam Buku Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hlm. 199.

mampu dalam mendapatkan motor atau mobil yang diinginkan. Ketentuan

Rahn Tasjily sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip Syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi uangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.³⁰

Prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily* sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan.

Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya apabila bermuamalah secara tidak tunai (hutang piutang), hendaknya ditulis dan apabila tidak ditulis, maka diperintahkan untuk memberikan jaminan sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

³⁰ Dikutip dari Fatwa DSN-MUI NO 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*, Dalam Buku Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, ..., hlm. 200.

B. Konsep Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Ganti Rugi (*Ta'widh*) Menurut Hukum Islam

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah pasti mempunyai resiko salah satunya keterlambatan angsuran. Walaupun Lembaga Keuangan Syariah telah selektif dan menganalisis sebelum memberikan pembiayaan bukan berarti resiko hilang, akan tetapi hal tersebut dapat meminimalisir resiko yang terjadi sehingga kemungkinan gagal bayar pasti ada.

Para pihak wajib melakukan apa yang timbul dari akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur).

Dalam hukum Islam, terdapat istilah *dhaman al-'aqd*, yaitu tanggung jawab melaksanakan akad. Dalam istilah tanggung jawab terkait dengan konsep ganti rugi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu :³¹

- a. Daman akad (*dhaman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberi ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 330.

- b. Daman udwan (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'I adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Di samping itu, dalam melindungi aktifitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, salah satunya yaitu prinsip tidak boleh mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.³² Dengan demikian transaksi apapun yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti rugi (*Ta'widh*).

- a. Pengertian Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Dalam karya Iyadh Ibn Issaf Ibn Maqbal al-'Inzi yang dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam buku *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, Al-Ta'widh* secara istilah yaitu kewajiban melakukan pembayaran untuk mengganti biaya kerugian yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi yang dimaksud pembebanan biaya kepada nasabah yang telah melakukan

³² Syufa'at, "Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Al-Ahkam, vol 23, 2013.

keterlambatan angsuran kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menanggulangi pembiayaan yang bermasalah.³³

Menurut Bagya Agung Prabowo dalam buku *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* mengatakan bahwa *Ta'widh* adalah kerugian yang ditanggungkan kepada orang yang telah melanggar janji. Melanggar janji maksudnya adalah bahwa salah satu pihak sengaja tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan pihak lawan. *Ta'widh* yang dimaksud menutup kerugian yang dialami baik berupa benda maupun uang tunai.³⁴

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* (عوض) yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *Ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.³⁵ Secara umum pengertian ganti rugi (*Ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Secara istilah definisi ganti rugi (*Ta'widh*) yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbab al-Zuhaili:³⁶

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 154.

³⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggta IKPAI), 2012), hlm. 69.

³⁵ Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), hlm. 449.

³⁶ Wahbab al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

التَّعْوِضُ : هُوَ تَغْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْخَطَأِ

Artinya:

“Ganti rugi (*Ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.”

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam “Bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang., baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaan, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun manfaat.³⁷

Biaya *Ta'widh* (ganti rugi) timbul karena:

- 1) Digunakan untuk memberi informasi kepada nasabah yang telah melakukan wanprestasi seperti menggunakan alat elektronik, media masa, maupun mengirim surat.
- 2) Adanya pihak ketiga untuk mengumpulkan atau menagih hutang kepada nasabah.
- 3) Kegiatan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk mencari solusi terhadap pembiayaan yang bermasalah.³⁸

³⁷ Jadurrabb, *al-Ta'wis al-Ittifaqi 'an 'Adam Tanfidz al-Itizam au at-Ta'akhhur fih: Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I*, (Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jama'I, 2006), hlm. 170.

³⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, ..., hlm. 155.

Ta'widh adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh Lembaga Keuangan Syariah akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.³⁹

b. Syarat-Syarat *Ta'widh*

Menurut Bagya Agung Prabowo syarat sahnya *Ta'widh* adalah kerugian riil yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dan dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat penagihan. Jumlah atau besaran gan rugi (*Ta'widh*) sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).⁴⁰

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk penambahan apapun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk-bentuk riba. Namun, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang telah memberikan kemungkinan pemberian ganti rugi (*Ta'widh*) dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah dapat mengenakan *Ta'widh* (ganti rugi) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada

³⁹ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 89-90.

⁴⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, ..., hlm. 70.

nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank syariah.

- 2) Besar *Ta'widh* (ganti rugi) hanya dapat diakui sebagai pendapatan bank Syariah adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank Syariah untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss, al-furshah al-adha'iah*).
- 3) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam, istishna'*, serta *murabahah*, yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai.
- 4) Ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanya boleh dikenakan bank Syariah sebagai *shahibul maal* apabila bagian keuntungan bank Syariah yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*.
- 5) Klausul pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
- 6) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank Syariah dengan nasabah.⁴¹

2. Ganti Rugi (*Ta'widh*) Menurut Fatwa DSN-MUI

a. Fatwa DSN-MUI Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Konsep ganti rugi (*Ta'widh*) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah. Ini juga sebagai kompetitif terhadap Lembaga Konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan atau *time value of money* apabila nasabah terlambat melunasi kewajibannya.

Namun perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 juga menjelaskan ganti rugi (*Ta'widh*) yang diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu Lembaga Keuangan Syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Dimana penerapan ganti rugi (*Ta'widh*) dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 bertujuan untuk melindungi para yang bertransaksi baik nasabah maupun Lembaga Keuangan Syariah, sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya.⁴²

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk-bentuk *riba*. Namun, Fatwa DSN-MUI yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu berkenaan dengan peraturan ganti rugi (*Ta'widh*) dalam pembiayaan yang dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti rugi dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan. Dalam fatwa tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

- 1) Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*Ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut

⁴² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, ..., hlm. 71-72.

dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).

- 5) Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishna*, serta *Murabahah* dan *Ijarah*.
- 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Khusus:

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cederajanji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁴³

b. Landasan Dasar Hukum Ganti Rugi (*Ta'widh*) menurut Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI dasar hukum ganti rugi (*Ta'widh*)

sebagai berikut:

- 1) Surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ
 الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya :

⁴³Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁴⁴

Dalam ayat ini memerintahkan agar memenuhi akad-akad yang dibuat ketika para pihak yang bertransaksi membuat kesepakatan, maka yang telah berakad harus memenuhi kesepakatannya.⁴⁵

2) Surat Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
 أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁴⁶

Dari ayat diatas dapat dihubungkan dengan ganti rugi (*Ta'widh*) bahwasannya barang siapa melakukan serangan

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, ... , hlm 156.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 258-259.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm 156.

(kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

3) Surat Al-Isra' ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.⁴⁷

Dalam ayat ini memerintahkan untuk memenuhi janji yang telah disepakati, semua yang berakad harus memenuhi dan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjiannya.⁴⁸

4) Surat Al-Baqarah ayat 279-280 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ^ج وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, ..., hlm. 429.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, ..., hlm. 259.

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280).”⁴⁹

Dalam ayat ini berisikan untuk meninggalkan riba karena dalam mengambil tambahan dari harta pokok merupakan riba tanpa adanya transaksi pengganti yang dibenarkan oleh *Syariah* karena merupakan kezaliman (279). Dalam ayat ini menjelaskan tentang pemberian waktu pembayaran kepada nasabah yang sedang pailit. Dalam hal ini memerintahkan untuk bersabar dan memberikan waktu kepada orang yang sedang pailit karena sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya (280).⁵⁰

- 5) Hadits Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Haurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ.

Artinya :

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, ..., hlm. 70.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, ..., hlm. 259-

*Abu Hurairah r.a. mengatakan, Rasulullah saw, bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan barang siapa diantara kalian yang utangnya diserahkan kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu”.*⁵¹

- 6) Hadits Nabi riwayat Nasa’I dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَ الْوَاحِدِ يَجْلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya :

*Dari ‘Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, hal itu menghalalkan kehormatan dan sanksi hukuman terhadapnya”. (HR Abu Daud dan Nasa’i. Al Bukhari menilai hadits ini mu’allaq, sementara Ibnu Hibban menilai shahih).*⁵²

- 7) Hadits dari ‘Amr bin ‘Auf Al Muzani yang diriwayatkan Tirmidzi

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ (الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَانْكَرَوْا عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَانَتْ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Artinya:

“Dari ‘Amr bin ‘Auf Al Muzani, bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: Perdamaian itu halal antara Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan Muslimun (wajib) berperang dengan syarath-syarath mereka kecuali syarath yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, ..., hlm. 393.

⁵² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, ..., hlm. 386.

dan ia shahkan dia, tetapi mereka bantah dia karena rawinya yaitu Katsir bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf itu adalah lemah; rupanya ia anggap dia (shah) lantaran banyak jalannya.⁵³

8) Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

*“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghalalkannya”.*⁵⁴

c. Pendapat Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*)

Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*) ada beberapa ulama yang berpendapat tentang ganti rugi (*Ta’widh*) diantaranya:

- 1) Menurut pendapat Ibnu Qudhamah dalam Al-Mughni yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*) bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karena harus dihindakan, ia menyatakan:

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika perpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut:

Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan, misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijah, maka debitur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia

⁵³ A. Hassan, Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, ... , hlm. 387.

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 10.

boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

- 2) Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam *Nazariyah Al-Dhaman*, yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), ia menyatakan:

“Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h.87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding...*
- b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h.93).*

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial. Maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaatkannya” (h.96)

- 3) Menurut pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’liy dalam *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-islamiyyah*, yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), ia menyatakan bahwa:

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis keterlambatan pembayaran tersebut.”

- 4) Menurut pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh “Isham Anas az-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, yang dikutip dalam Fatwa DSN-

MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*),

bahwa:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah Syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab, karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighashab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”⁵⁵

⁵⁵Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

BAB III

PELAKSANAAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN SYARIAH KENDAL PERMAI

A. Profil Pegadaian Syariah Kendal

1. Sejarah Pegadaian Syariah Kendal

Pegadaian Syariah Kendal Permai mulai beroperasi pada tanggal 15 Maret 2010. Lokasi Pegadaian Syariah Kendal Permai berada di komplek Kendal Permai B-10, Patukangan, Kendal yang merupakan komplek pertokoan dan tidak jauh dari pasar. Hingga saat ini Pegadaian Kendal Permai telah memiliki nasabah yang berjumlah kurang lebih 4.000 nasabah. Pegadaian Syariah Kendal Permai dalam operasinya telah menghasilkan beberapa produk. Produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Kendal Permai yaitu: *Rahn*, *Amanah*, *Arrum BPKB*, *Arrum Haji*, *Mulia*, *Tabungan Emas*, *Konsinyasi Emas*, *Jasa Taksir*, *Jasa Titipan*, *Multi Pembayaran Online*. Produk *Arrum Haji* merupakan produk baru Pegadaian Syariah Kendal Permai sebagai sebuah inovasi baru. Sedangkan produk *Rahn* merupakan produk awal dari Pegadaian.¹

2. Visi Dan Misi Pegadaian

Visi dan misi Pegadaian Syariah Kendal Permai termasuk di dalam visi dan misi Pegadaian Pusat yaitu sebagai berikut:

¹ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

a. Visi

Visi dari Pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.²

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan insfrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

3. Struktur Organisasi

Pegadaian Syariah Kendal Permai berlokasi di Kompleks Kendal Permai Blok B-10 Kendal. Pegadaian Syariah Kendal Permai merupakan

²<http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.38.

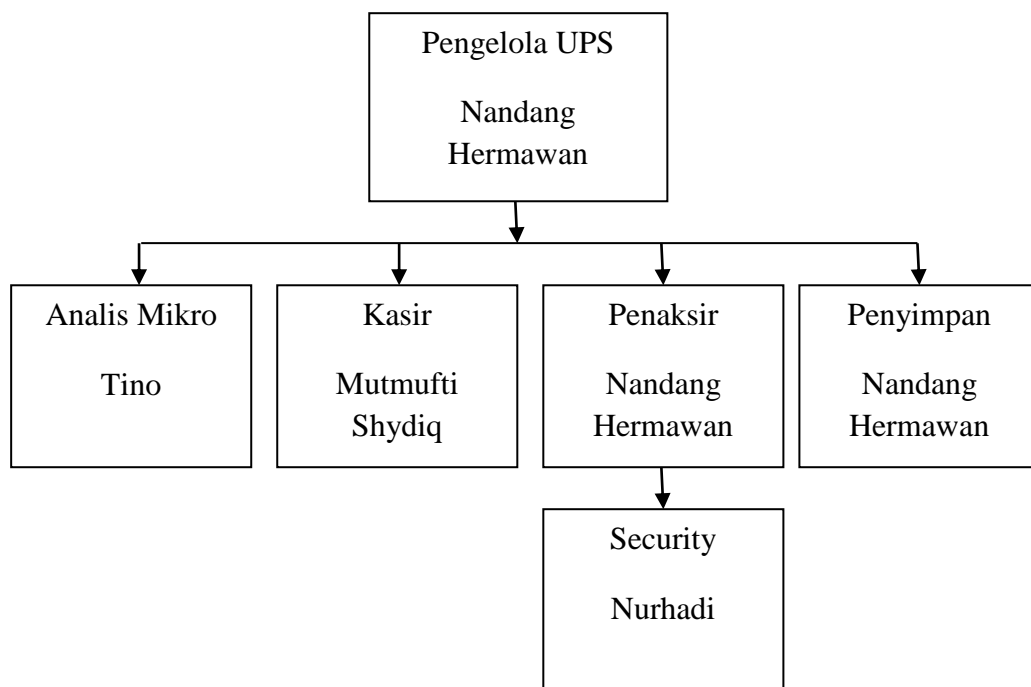
³<http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

unit pelayanan dari Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang yang dibawah binaan Pegadaian Kantor Wilayah Semarang.⁴

Pegadaian Syariah Kendal Permai memiliki anggota pengurus, dimana anggota pengurus tersebut mempunyai masing-masing tugas seperti halnya pengelola UPS yang bertugas sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat juga melakukan penyimpanan atas barang gadai dan bertugas sebagai penaksir barang gadai. Kasir mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional. Security bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rajin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Sedangkan analis mikro bertugas melakukan analisis atau kajian yang berkaitan dengan bidang tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing.⁵ Dimana struktur organisasinya sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan, (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, jam 13.30).

⁵ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).



Sumber: Pegadaian Syariah Kendal Permai

1. Produk Pegadaian Syariah Kendal Permai

Pegadaian Syariah Kendal Permai menawarkan beberapa produk, yaitu:

1. *Rahn*⁶

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *Ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Untuk mendapatkan produk *Rahn* ini ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya, mengisi formulir permintaan *Rahn*, menyerahkan barang jaminan (*marhun*)

⁶ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

bergerak (Perhiasan emas atau berlian, emas batangan, smartphone, laptop dan barang elektronik lainnya, motor, mobil dan benda bergerak lainnya.

Pada produk *Rahn* nasabah yang ingin mengadaikan barang-barang berupa elektronik dengan proses, yaitu prosedur pemberian mengisi formulir permintaan *Rahn*, nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan, petugas pegadaian akan menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan, besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*, apabila disepakati besarnya pinjaman maka nasabah mendatangi akad dan menerima uang pinjaman.

Dalam produk *Rahn* ini mempunyai keuntungan yaitu palayanan *Rahn* tersedia lebih dari 600 outlet di Pegadaian Syariah seluruh Indonesia, pinjaman (*marhun bih*) dapat dimulai dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- atau lebih, proses pinjaman tanpa harus membuka rekening, pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, penerimaan *marhun bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer direkening nasabah, prosedur pinjaman sangat cepat hanya membutuhkan waktu 15 menit, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama pinjaman.

2. *Amanah*⁷

Pembiayaan *Amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip Syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk

⁷ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

memilih motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun. Dengan melampirkan kelengkapan fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah, membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%), menandatangani akad amanah.

Di produk *Amanah* juga mempunyai keuntungan yaitu layanan *Amanah* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, uang muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, prosedur pengajuan yang tergolong cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap transaksi sesuai prinsip syariah.

3. *Arrum* BPKB⁸

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. Dimana dalam produk *Arrum* BPKB ini adanya persyaratan, yaitu fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) digunakan sebagai agunan, memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun, survey dan Analisa kelayakan usaha, menandatangani akad *arrum*.

⁸ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

Produk *Arrum BPKB* ini mempunyai keunggulan, yaitu layanan *Arrum BPKB* ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, proses pinjaman/*marhun bih* butuh waktu 3 hari dan pinjaman akan cepat diterima, agunan menggunakan BPKB kendaraan bermotor, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu, prosedur pengajuan pinjaman/*marhun bih* cepat dan mudah, *ijarah* relative murah dengan angsuran tetap perbulan, pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

4. *Arrum Haji*⁹

Arrum Haji adalah produk pegadaian Syariah yaitu dengan memanfaatkan emas untuk mendaftarkan haji. Emas senilai Rp. 7 juta akan memperoleh pinjaman RP. 25 juta dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji. Dalam produk *Arrum Haji* ini juga adanya persyaratan, yaitu dengan menyerahkan fotokopi KTP dan jaminan emas serta SABPIH.

produk *Arrum Haji* juga memiliki keuntungan seperti halnya produk-produk yang lain, yaitu memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, proses mudah, pinjaman dapat di angsur 12, 18, 24 atau 36 bulan, biaya pemeliharaan barang jaminan dan *kafalah* terjangkau, layana professional, emas dan SABPIH aman disimpan di Pegadaian.

⁹ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

5. Mulia¹⁰

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid dan aman secara riil. Mulia (*Murabahah* logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Dalam produk ini adanya persyaratan seperti halnya fotokopi KTP atau identitas lainnya, mengisi formulir, menyerahkan uang muka, menandatangani akad mulia.

Dalam produk logam mulia memiliki keuntungan, yaitu emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan, proses mudah dengan layanan profesional, alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset, sebagai asset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia emas batangan dengan berat mulai 5 gram sampai dengan 1 kilogram, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia, jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

¹⁰ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

6. Tabungan Emas¹¹

Pegadaian tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Dalam produk ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor), mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Emas, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.

Pada produk tabungan emas memiliki keuntungan, yaitu pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia, top up saldo tabungan emas dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital Server, layanan petugas yang sangat profesional, alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan anda.

7. Konsinyasi Emas¹²

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif. Dengan persyaratan fotokopi identitas diri, kuitansi pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di

¹¹ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

¹² <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

Pegadaian, mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6.000 (sebanyak 2 lembar).

Produk konsinyasi emas memiliki keunggulan, yaitu dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya, emas ana terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan, menghasilkan keuntungan yang kompetiti dengan investasi lainnya.

8. Jasa Taksir¹³

Pegadaian jasa taksir adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relative terjangkau. Layanan jasa taksir ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dengan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya. Dengan persyaratan, nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, mengisi formulir permohonan pengujian. Dalam hal ini objek jasa taksir yaitu perhiasan emas dan lantakan, logam selain emas, batu mulia lainnya.

Jasa taksir mempunyai keunggulan, yaitu layanan jasa taksiran tersedia diseluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia, proses mudah, pelayanan professional, hasil uji terpercaya karena diuji oleh juru taksir oleh juru taksr berpengalaman, layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji, biaya terjangkau.

¹³ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

9. Jasa Titipan¹⁴

Pegadaian jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami. Dengan persyaratan, nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian, mengisi formulir permohonan jasa titip.

Dalam produk jasa titipan memiliki keunggulan, yaitu layanan jasa titipan tersedia di outlet tertentu Pegadaian di seluruh Indonesia, proses mudah, aman terpercaya, jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang, biaya terjangkau.

10. Multi Pembayaran Online¹⁵

Multi pembayaran online adalah produk inovasi pelayanan Pegadaian, yaitu melayani berbagai macam pembelian dan pembayaran, seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, air, tiket, internet, TV berbayar, iuran BPJS dan lain-lain.¹⁶

¹⁴ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

¹⁵ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

¹⁶ <http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 Pukul 18.46.

Multi pembayaran online ini memiliki keunggulan seperti halnya produk-produk yang lainnya, yaitu layanan MPO tersedia di outlet Pegadaian seluruh Indonesia, pembayaran secara real time sehingga member kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi, biaya administrasi kompetitif, pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersaing dengan gadai emas, untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan, setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan, prosedur sangat mudah jadi nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

B. Praktek Ganti Rugi (*Ta'widh*) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai dengan Bapak Nandang Hermawan, di Pegadaian Syariah Kendal Permai menggunakan akad *Rahn*. Akad *Rahn* sendiri adalah menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Pada produk *Amanah* di Pegadaian Kendal Permai menggunakan akad *Rahn Tasjily*. Nasabah yang ingin membeli sepeda motor atau mobil yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah Kendal Permai, nantinya menyerahkan surat bukti kepemilikan sebagai jaminan seperti yang telah dituliskan dalam surat perjanjian dan membayar uang muka yang telah disepakati (minimal 20%), dimana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nasabah membeli sepeda motor/mobil baru sehubungan STNK, Nomor polisi dan BPKB masih dalam proses Polres/Samsat maka nasabah membuat surat pernyataan diatas materai jika surat bukti kepemilikan/BPKB sudah jadi maka wajib menyerahkan surat bukti kepemilikan/BPKB kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai.
2. Tetapi jika nasabah membeli sepeda motor/mobil setengah pakai (*second*), pihak nasabah diwajibkan langsung menyerahkan surat bukti kepemilikan/BPKB kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai.¹⁷

Pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Kendal Permai, jika ada nasabah yang melakukan keterlambatan (*wanprestasi*) maka Pegadaian Syariah Kendal Permai memberikan peringatan dengan surat teguran kepada nasabah. Pegadaian Syariah Kendal Permai juga menetapkan ganti rugi (*Ta'widh*).¹⁸ Ganti rugi (*Ta'widh*) sendiri adalah ganti rugi yang ditanggungkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai dalam melakukan pembayaran angsuran dan ganti rugi tersebut sudah ditentukan dalam surat perjanjian.¹⁹ Ganti rugi tersebut digunakan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Kendal ketika memberitahukan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan angsuran.²⁰

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

²⁰ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

Pelaksanaan penetapan ganti rugi (*Ta'widh*) terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan membayar angsuran pada pembiayaan produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Kendal Permai yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam hal ini Pegadaian Syariah Kendal Permai selaku kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana nasabah selaku debitur akan menerima fasilitas pembiayaan dari Pegadaian Syariah Kendal Permai dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian sepeda motor atau mobil. Jika konsumen sepakat dan menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut dengan ketentuan yang telah ada dalam surat perjanjian Pegadaian Syariah Kendal.²¹

Pelaksanaan ganti rugi (*Ta'widh*) pada proses *restrukturisasi* (perpanjangan jangka waktu tagihan) ialah jika nasabah benar-benar dalam keadaan tidak bisa melunasi tapi masih mempunyai itiqad baik untuk membayar kewajibannya, maka pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai berhak untuk melakukan *restrukturisasi* terhadap angsuran nasabah yang menunggak yang telah menjadi kewajibannya. Proses *restrukturisasi* itu tentunya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai atas proses penagihan kepada pihak nasabah, dan itu harus benar-benar *riil* perhitungannya. Misalnya pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai Butuh mengeluarkan biaya telpon untuk menghubungi nasabah, biaya

²¹ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

transportasi untuk survey ke rumah nasabah atau yang lainnya dan itu harus jelas pembuktiannya.²²

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh nasabah sampai seluruh pinjaman dan kewajiban lainnya telah dibayar lunas atau telah selesai (jangka waktu). Namun menurut Bapak Nandang Hermawan meskipun perjanjian pembiayaan telah ditandatangani, tetapi masih ada nasabah yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk menunda-nunda angsuran.²³

Pegadaian Syariah Kendal Permai menentukan ganti rugi (*Ta'widh*) yang besar persentasenya ditentukan oleh Pegadaian Pusat yang ganti rugi (*Ta'widh*) tidak dibayarkan diawal pembiayaan namun dibayarkan ketika saat mengangsur. Dimana ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*) yang ada dalam Pegadaian Syariah Kendal Permai sebagai berikut:

1. Apabila *Rahin* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi yang besarnya seperti pada ayat (2).
2. Setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran.²⁴

Bapak Nandang Hermawan menjelaskan bahwa ada beberapa konsumen yang mengalami keterlambatan angsuran seperti DAS, MN, MY. Penyebab dari tertundanya pembayaran tersebut ada berbagai alasan

²² Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

²³ Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

²⁴ Surat Perjanjian Pegadaian Syariah Kendal Permai Pada Produk Amanah.

diantaranya untuk memenuhi kebutuhan lainnya, uang yang digunakan mengangsur dipinjam kerabat dan masih banyak alasan lainnya.²⁵

Hasil wawancara peneliti dengan nasabah bernama DAS, MN, MY benar bahwa mereka membeli sepeda motor/mobil melalui pembiayaan produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Kendal Permai dengan cara kredit.

Nasabah DAS, MN, MY mengatakan bahwa mereka memiliki kendala dalam hal angsuran karena beberapa hal. Pada waktu mereka tidak membayar angsuran di Pegadaian Syariah Kendal Permai mereka diberi teguran beberapa kali, karena mereka terlambat membayar angsuran.²⁶

Menurut penuturan nasabah DAS, beliau terlambat membayar angsuran dikarenakan uang yang akan untuk membayar angsuran dipinjamkan kepada kerabat dengan perjanjian bahwa angsuran akan dibantu setiap bulan, tetapi kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah penundaan pembayaran. Selain itu uang lainnya diputarkan untuk usaha yang lain dengan harapan mendapat uang tambahan tetapi justru berkurang karena pendapatan usaha menurun karena persaingan usaha yang semakin ketat. Sehingga DAS dari pertama kali pada tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 30 Juli 2018 pernah melakukan keterlambatan 4 kali angsuran.²⁷

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

²⁶ Wawancara Dengan Nasabah DAS, MN, MY Selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kendal Permai.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Nasabah DAS Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2019, Pukul 18.45).

Dimana rincian dikenakan gantir rugi (*Ta'widh*) atas keterlambatan yang dilakukan oleh DAS sebagai berikut:

Atas nama DAS :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Hutang atas pinjaman | : Rp. 10.500.000 |
| Angsuran perbulan | : Rp. 544.000 |
| Jangka waktu angsuran | : 24 bulan / 2 tahun |

Pada saat melaksanakan angsuran DAS melakukan keterlambatan angsuran diantaranya pada angsuran pertama melakukan keterlambatan angsuran selama 10 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar Rp. 725.4 perhari, sehingga selama 10 hari DAS dikenakan biaya Rp. 7.254.²⁸

Menurut penuturan nasabah MN, beliau terlambat membayar angsuran dikarenakan uang yang untuk membayar angsuran beliau gunakan untuk kebutuhan yang lainnya seperti halnya membayar sekolah anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga terjadilah penundaan pembayaran angsuran. Dalam hal ini MN pernah mengalami keterlambatan angsuran mulai dari tanggal 2 April 2018 sampai tanggal 6 September 2018 pernah erlambat sebanyak 4 kali angsuran²⁹

Dimana rincian dikenakan gantir rugi (*Ta'widh*) atas keterlambatan yang dilakukan oleh DAS sebagai berikut:

Atas nama MN :

| | |
|----------------------|------------------|
| Hutang atas pinjaman | : Rp. 50.000.000 |
| Angsuran perbulan | : Rp. 1.891.000 |

²⁸ Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Nasabah MN Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Januari 2019, Pukul 19.00).

Jangka waktu angsuran : 36 bulan / 2 tahun

Pada saat melaksanakan angsuran MN melakukan keterlambatan angsuran diantaranya pada angsuran kedua melakukan keterlambatan angsuran selama 5 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar Rp. 2.521perhari, sehingga selama 5 hari MN dikenakan biaya Rp. 12.607.³⁰

Sedangkan menurut nasabah MY, beliau terlambat membayar angsuran karena uang yang untuk mengangsur, digunakan untuk mengangsur pinjaman yang lainnya terlebih dahulu. Sehingga beliau mengalami keterlambatan angsuran di Pegadaian Syariah Kendal Permai. Sedangkan MY dari awal angsuran tanggal 18 Januari 2018 sampai pada tanggal 30 Juni 2018 pernah melakukan keterlambatan sebanyak 5 kali angsuran.³¹

Atas nama MY :

Hutang atas pinjaman : Rp. 13.000.000

Angsuran perbulan : Rp. 683.000

Jangka waktu angsuran : 24 bulan / 2 tahun

Pada saat melaksanakan angsuran MY melakukan keterlambatan angsuran diantaranya pada angsuran kedua melakukan keterlambatan angsuran selama 14 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar Rp. 911 perhari, sehingga selama 14 hari MY dikenakan biaya Rp. 12.750.³²

Penyelesaian perkara keterlambatan angsuran (wanprestasi) dengan berbagai cara oleh pihak Pegadaian Syariah Kendal yaitu yang pertama

³⁰ Arisp Pegadaian Syariah Kendal Permai.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Nasabah MY Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2019, Pukul 19.00).

³² Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai.

dengan memberikan surat peringatan. Secara yuridis surat peringatan tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada nasabah untuk membayar artinya jika nasabah yang mendapatkan surat peringatan tetapi tidak menghiraukan surat peringatan tersebut maka Pegadaian Syariah Kendal Permai dapat memaksa sehingga nasabah diharapkan menyelesaikan pinjamannya atau paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya. Dengan begitu maka membebankannya ganti rugi (*Ta'widh*) kepada nasabah yang melakukan perkreditan yang mengalami keterlambatan karena untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai biaya tersebut meliputi biaya mengirim surat teguran terhadap nasabah, biaya transportasi untuk survey kerumah nasabah atau yang lainnya dan itu harus jelas buktinya. Besarnya ganti rugi (*Ta'widh*) untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar “4% x biaya angsuran : 30”, ketentuan ini sudah dijelaskan dalam surat perjanjian. Ganti rugi (*Ta'widh*) ini pun langsung dibayar pada saat membayar angsuran.

Menurut Bapak Muhyiddin ganti rugi boleh dikenakan kepada nasabah yang telah terlambat membayar angsuran. Tetapi ganti rugi tersebut harus dari kerugian riil. Bahkan dalam bentuk persenan diperbolehkan asalkan dari kerugian yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah, tidak boleh dari jumlah pinjaman nasabah.

BAB IV

ANALISIS GANTI RUGI (*TA'WIDH*) DI PEGADAIAN SYARIAH

KENDAL PERMAI

A. Analisis Praktek Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk *Amanah* Di Pegadaian Syariah Kendal Permai

Pembiayaan produk *Amanah* menggunakan akad *Rahn Tasjily* yang merupakan perjanjian menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Akad tersebut digunakan sebagai salah satu dalam kegiatan penyaluran dana. Dimana Pegadaian Syariah Kendal Permai yang menerapkan akad *Rahn* ke dalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor atau mobil dalam kondisi baru ataupun setengan pakai (*second*).

Rahn merupakan salah satu akad dimana harta yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan jaminan dalam pembayaran keseluruhan atau sebagian dengan cara menjual atau memiliki harta tersebut. mekanisme pembayaran yang biasa digunakan dalam akad *Rahn* yaitu menggunakan pembayaran dengan istilah pembayaran cicil atau angsuran.

pada dasarnya siapapun yang memiliki harta benda dalam bentuk apapun tidak terlindungi dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh resiko yang tidak pasti. Berbagai macam usaha dilakukan demi mengatasi berbagai risiko yang tidak dihaparkan mungkin terjadi, baik dalam lingkungan bisnis, pekerjaan maupun terhadap kekayaan, salah satu

upaya tersebut adalah melalui pembebanan biaya ganti rugi (*Ta'widh*) kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran.

Pegadaian Syariah Kendal Permai merupakan salah satu lembaga yang kegiatan operasionalnya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan khususnya pada produk *Amanah*. Di dalam produk *Amanah* ini adanya pembebanan biaya ganti rugi (*Ta'widh*) sebagai bentuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.¹ Dalam rangka mendisiplin dan memberi efek jera kepada nasabah dengan tujuan nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran pada tepat waktunya. Secara prinsip apabila terjadi kelalaian dalam pembayaran angsuran dapat dikenakan sanksi sebagai wujud pendisiplinan terhadap nasabah. Namun dengan menerapkan ganti rugi (*Ta'widh*) yang tidak lain sebagai upaya Pegadaian Syariah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang telah melakukan keterlambatan angsuran setiap bulannya. Mengingat ganti rugi (*Ta'widh*) sendiri hakikatnya merupakan suatu bentuk ganti rugi atas kerugian riil yang benar-benar dialami oleh Pegadaian.

Dalam prakteknya, dana ganti rugi (*Ta'widh*) yang diperoleh Pegadaian Syariah Kendal Permai dialokasikan kedalam dana kebajikan umat, dimana Pegadaian Syariah akan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan. dengan kata lain pihak Pegadaian Syariah tidak memasukkan dana tersebut sebagai pendapatan pribadi Pegadaian Syariah. Pada hakikatnya ganti rugi (*Ta'widh*) merupakan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah

¹ Wawancara Dengan Bapak Nandang Hermawan (Di Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 4 Januari 2019, Jam 13.30).

dalam rangka penggantian kerugian akibat biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga dana yang diperoleh dari pemberlakuan ganti rugi (*Ta'widh*) ini seharusnya masuk ke dalam pendapatan pribadi Pegadaian Syariah karena ia merupakan hak sepenuhnya yang timbul dari kerugian biaya-biaya yang telah Pegadaian Syariah keluarkan. Menanggapi hal ini, ganti rugi (*Ta'widh*) yang sejatinya merupakan biaya ganti rugi yang timbul akibat keterlambatan membayar angsuran dialih fungsikan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.

Pegadaian Syariah memberlakukan ganti rugi (*Ta'widh*) ini dalam kontrak perjanjian antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah atau disebut dengan istilah akad *Rahn* pada produk *Amanah*. Adapun ketentuan pada Pasal 3² antara lain berisi poin-poin sebagai berikut:

Atas timbulnya Pinjaman *Amanah* ini *Rahin* diwajibkan membayar biaya-biaya setelah akad ini ditanda tangani dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya proses sebesar 239.050,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah),
2. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi *Marhun* (barang jaminan), biaya pemblokiran BPKB maupun membuka blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman.
3. Ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif ganti rugi diatur dalam Pasal 5 akad ini.

Dalam Pasal 5 sendiri point-pointnya sebagai berikut:

² Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai.

1. Apabila *Rahin* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) yang besarnya seperti pada ayat (2) pasal ini.
2. Setiap satu keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran.

Dari beberapa point di atas, khususnya pada point (3) pada Pasal 3 yang telah dijelaskan pada point (2) pada Pasal 5 terlihat bahwa Pegadaian Syariah Kendal Permai menerapkan ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*) bagi nasabahnya yang melakukan keterlambatan angsuran. Adapun ganti rugi (*Ta'widh*) dalam penggunaannya di Pegadaian Syariah Kendal Permai di definisikan sebagai ganti rugi (*Ta'widh*) berupa pembayaran sejumlah uang dari nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah yang dikenakan atas kesengajaan atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian Pegadaian Syariah.

B. Analisis Praktek Ganti Rugi (*Ta'widh*) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai terhadap Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian menghindari riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Untuk menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan yang akan merugikan salah satu pihak dengan menetapkan ganti rugi (*Ta'widh*).

Menurut pendapat Bagya Agung Prabowo bahwa *Ta'widh* adalah kerugian yang ditanggungkan kepada orang yang telah melanggar janji. Melanggar janji yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan pihak lawan disebabkan karena nasabah wanprestasi.

Dalam proses ganti rugi (*Ta'widh*) ini dalam Fatwa sudah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh* dimana terdapat ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Ketentuan khusus:

1. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pegadaian Syariah sudah sesuai dalam menerapkan ganti rugi (*Ta'widh*) untuk nasabah yang sengaja atau lalai dalam pembayaran angsuran, karena nasabah pada produk *Amanah* yang melakukan penyimpangan dari ketentuan akad sebenarnya mereka mampu untuk membayar angsuran tetapi uang yang digunakan untuk membayar angsuran digunakan untuk kebutuhan yang lain terlebih dahulu. Bahwa penentuan ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah sebenarnya untuk memberikan sanksi terhadap nasabah dan untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak terjadi keterlambatan lagi.

Seperti misalnya nasabah DAS, beliau terlambat membayar angsuran karena uang yang akan digunakan membayar angsuran

dipinjamkan kepada kerabatnya dengan perjanjian bahwa angsuran akan dibantu setiap bulan, tetapi kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah penundaan pembayaran.

Atas nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan nasabah tersebut mampu untuk membayar, Pegadaian Syariah berhak untuk membebankan ganti rugi (*Ta'widh*) untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam penagihan hak yang dibayarkan oleh nasabah. Penetapan ganti rugi (*Ta'widh*) untuk nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran sudah sesuai seperti dijelaskan dalam Hadits Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Haurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ .

Artinya :

Abu Hurairah r.a. mengatakan, Rasulullah saw, bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan barang siapa diantara kalian yang utangnya diserahkan kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu”.

Bahkan ulama juga berpendapat tentang nasabah yang melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran padahal nasabah tersebut mampu

untuk membayarnya seperti menurut pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’liy dalam *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah*, yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*), ia menyatakan bahwa:

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis keterlambatan pembayaran tersebut.”

2. Kerugian yang dapat dikenakan Ta’widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Dan Besar ganti rugi (Ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-I’ah).

Pegadaian Syariah Kendal Permai dalam menetapkan ganti rugi (*Ta’widh*) belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI. Karena di Pegadaian Syariah dalam menetapkan ganti rugi (*Ta’widh*) berdasarkan angsuran setiap bulan, angsuran tersebut terdiri dari jumlah pinjaman nasabah dan biaya pemeliharaan. Sedangkan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI ganti rugi (*Ta’widh*) tersebut harus dari kerugian riil yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dan pihak Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi (*Ta’widh*) tersebut bukan dari kerugian riil apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Melainkan pihak Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi (*Ta’widh*) setiap hari padahal pihak Pegadaian Syariah dalam menginformasikan kepada nasabah yang telah telambat membayar

angsuran cuman beberapa kali saja tidak setiap hari nasabah diberi informasi oleh pihak Pegadaian Syariah.

Seperti contoh menurut nasabah MY, beliau terlambat membayar angsuran karena uang yang untuk mengangsur, digunakan untuk mengangsur pinjaman yang lainnya terlebih dahulu. Sehingga beliau mengalami keterlambatan angsuran di Pegadaian Syariah Kendal Permai. Sedangkan MY dari awal angsuran tanggal 18 Januari 2018 sampai pada tanggal 30 Juni 2018 pernah melakukan keterlambatan sebanyak 5 kali angsuran.³

Atas nama MY :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Hutang atas pinjaman | : Rp. 13.000.000 |
| Angsuran perbulan | : Rp. 683.000 |
| Jangka waktu angsuran | : 24 bulan / 2 tahun |

Pada saat melaksanakan angsuran MY melakukan keterlambatan angsuran diantaranya pada angsuran kedua melakukan keterlambatan angsuran selama 14 hari dimana perharinya dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar Rp. 911 perhari, sehingga selama 14 hari MY dikenakan biaya Rp. 12.750.⁴

Berikut merupakan penjelasan diatas jika penetapan ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan pendapat ulama menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Nazariyah Al-Dhaman*, yang dikutip

³ Hasil Wawancara Dengan Nasabah MY Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2019, Pukul 19.00).

⁴ Arsip Pegadaian Syariah Kendal Permai.

dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

(*Ta'widh*), ia menyatakan:

“*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h.87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding...
- 2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h.93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial. Maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya” (h.96).

Dimana di dalam Fatwa dijelaskan kerugian yang harus dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah seharusnya kerugian riil, semisal:

Pihak MY pada bulan ke 2 (dua) angsuran telah melakukan keterlambatan selama 14 (empat belas hari) dan pihak Pegadaian Syariah telah memberikan informasi atas keterlambatan tersebut melalui telfon sebanyak 3 (tiga) kali dan biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk menghubungi sebesar Rp. 500,- pada hari pertama, hari kedua pihak Pegadaian Syariah biaya untuk menghubungi sebesar Rp. 1.000,- dan pada hari ketiga menghubungi nasabah sebesar Rp. 2.000,-. Jadi ganti rugi (*Ta'widh*) yang harus dikeluarkan oleh MY secara riil sebagai berikut:

Hari pertama : Rp. 500,-
 Hari kedua : Rp. 1.000,-
 Hari ketiga : Rp. 2.000,- +
 Rp. 3.500,-

Jadi pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai seharusnya membebaskan ganti rugi (*Ta'widh*) kepada MY sebesar Rp. 3.500,-.

Jika pada bulan selanjutnya MY masih belum membayar angsuran secara berturut-turut dan Pegadaian Syariah telah mendatangi kerumah MY sebanyak 2 (dua) kali. Dan pihak Pegadaian Syariah pada hari pertama dan hari kedua telah mengeluarkan biaya perharinya sebesar Rp. 20.000,-. Jadi pihak MY dibebankan ganti rugi (*Ta'widh*) sebagai berikut:

Hari pertama :Rp. 20.000,-
 Hari kedua : Rp. 20.000,- +
 Rp. 40.000

Jadi pada bulan kedua keterlambatan berturut-turut MY dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar biaya menelfon dan biaya mendatangi kerumah MY yaitu sebesar Rp. 3.500,- + Rp. 40.000,- = Rp. 43.500,-.

3. Ta'widh hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna', serta murabahah dan ijarah.

Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn Tasjily* sudah sesuai karena akad *Rahn Tasjily* termasuk dalam golongan utang piutang. Dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* pihak Pegadaian Syariah dapat menahan benda atau surat bukti kepemilikan yang mempunyai nilai guna dijadikan jaminan. Jaminan tersebut bertujuan agar nasabah serius dengan

keinginannya. Jaminan tersebut berfungsi untuk penyelesaian utang. Ketika dalam transaksi nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dan dinyatakan *wanprestasi*, maka barang jaminan tersebut akan dieksekusi dengan cara di lelang. Dari hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi sisa hutang nasabah.

Seperti contohnya DAS telah melaksanakan pembiayaan produk Amanah dengan mengajukan permohonan untuk membeli kendaraan bermotor. Dimana DAS telah mengajukan permohonan membeli kendaraan bermotor yang baru, sehingga jaminan yang berupa BPKB masih dalam proses di Polres/Samsat maka DAS harus membuat surat pernyataan jika BPKB sudah jadi akan menyerahkannya kepada Pegadaian Syariah untuk dijadikan jaminan atas hutang yang beliau ajukan untuk membeli kendaraan bermotor.

Menurut pendapat ulama diperbolehkan utang piutang dengan menggunakan akad *Rahn*, seperti Menurut pendapat Ibnu Qudhamah dalam Al-Mughni yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karena harus dihindakan, ia menyatakan:

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika perpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut:

Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan, misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih

dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijah, maka debitur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan (gadaai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَا
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ketentuan Khusus

1. *Ta'widh* yang diterima dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya.

Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.

43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) pada ketentuan

khusus point 1 (satu). Dalam penerapannya Pegadaian Syariah

menggunakan dana ganti rugi (*Ta'widh*) yang sudah dibayarkan oleh nasabah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (kebajikan umat muslim) seperti untuk membangun masjid, membantu sekolah-sekolah bukan sebagai pendapatan perusahaan. Pegadaian syariah menetapkan ganti rugi (*Ta'widh*) tersebut sebenarnya untuk membuat jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

2. Jumlah *Ta'widh* besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dengan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

Pegadaian Syariah dalam jumlah ganti rugi (*Ta'widh*) setiap harinya besarnya sama ketika terjadi penundaan angsuran tetapi penentuan kerugiannya tidak riil yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Karena besarnya ganti rugi sudah ditentukan nominal persentasenya yang sudah dibuat sesuai dengan kebijakan peraturan lembaga dan disepakati oleh pihak nasabah. Untuk tata cara pembayarannya sudah sesuai, karena telah disepakati diawal ketika melaksanakan akad mengenai adanya ganti rugi (*Ta'widh*) kepada pihak nasabah.

3. Basarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Bahwa Pegadaian Syariah melaksanakan ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Karena di Pegadaian Syariah hanya memberikan perhitungannya ganti rugi (*Ta'widh*) tidak memberikan besarnya nominal ganti rugi (*Ta'widh*) yang akan dibayarkan oleh nasabah. Perhitungan tersebut hanya untuk memberikan

kepastian kepada nasabah agar nasabah mengetahui ganti rugi (*Ta'widh*) yang akan dibayarkan. Meskipun di Pegadaian Syariah dalam perhitungannya menggunakan persenan dan perhitungan tersebut sudah tercantum di dalam surat perjanjian. Dimana perhitungan di Pegadaian Syariah yang terdapat di Pasal 5 pada surat perjanjian yaitu:

- a. Apabila *Rahin* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) yang besarnya seperti pada ayat (2) pasal ini.
- b. Setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan serta mendiskripsikan masalah keseluruhan dan analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam pembahasan akhir dari kajian ini penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk *Amanah* di Pegadaian Syariah Kendal Permai diberlakukan terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran tidak serta merta langsung diadakannya penyitaan barang atau pelelangan barang. Tetapi nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai pinjaman yang jatuh tempo. Jika nasabah masih tidak membayarkan angsurannya akan mendatangi ke rumah nasabah. Jika masih tidak menghiraukan maka pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai akan memberikan somasi sebelum jaminan dieksekusi. Selama penunggakan tersebut nasabah akan terus dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sampai nasabah membayar angsurannya atau sampai terjadinya pelelangan.
2. Praktik ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dimana ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang belum sesuai di Pegadaian Syariah Kendal Permai yaitu “Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat

diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besar ganti rugi (*Ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*). Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Kendal Permai kerugian yang dialami oleh nasabah ketika terlambat membayar angsuran di dasarkan dari angsuran setiap bulannya bukan dari kerugian yang dialami pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai. Sehingga kerugian tersebut bukan kerugian riil tetapi kerugian yang diperkirakan. Seharusnya yang dijelaskan di dalam Fatwa kerugian yang harus dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah seharusnya kerugian riil, semisal: Dimana di dalam Fatwa dijelaskan kerugian yang harus dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah seharusnya kerugian riil, semisal:

Pihak MY pada bulan ke 2 (dua) angsuran telah melakukan keterlambatan selama 14 (empat belas hari) dan pihak Pegadaian Syariah telah memberikan informasi atas keterlambatan tersebut melalui telfon sebanyak 3 (tiga) kali dan biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk menghubungi sebesar Rp. 500,- pada hari pertama, hari kedua pihak Pegadaian Syariah biaya untuk menghubungi sebesar Rp. 1.000,- dan pada hari ketiga menghubungi nasabah sebesar Rp. 2.000,-. Jadi ganti rugi

(*Ta'widh*) yang harus dikeluarkan oleh MY secara rill adalah sebesar Rp. 3.500,-.

Jika pada bulan selanjutnya MY masih belum membayar angsuran secara berturut-turut dan Pegadaian Syariah telah mendatangi kerumah MY sebanyak 2 (dua) kali. Dan pihak Pegadaian Syariah pada hari pertama dan hari kedua telah mengeluarkan biaya perharinya sebesar Rp. 20.000,-. Jadi pihak MY dibebankan ganti rugi (*Ta'widh*) adalah pada bulan kedua keterlambatan berturut-turut MY dikenakan ganti rugi (*Ta'widh*) sebesar biaya menelfon dan biaya mendatangi kerumah MY yaitu sebesar Rp. 3.500,- + Rp. 40.000,- = Rp. 43.500,-.

B. Saran

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai agar berhati-hati dalam memberikan pinjaman yaitu dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat lagi pada pembiayaan produk *Amanah*. Dan kepada pihak nasabah agar tidak sering terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran disarankan untuk memahami arti pentingnya kedisiplinan dan tidak hanya memenuhi hak pribadi namun perlu diingat bahwa tuntutan hak ada kewajiban yang perlu dijalankan.
2. Kepada pihak Pegadaian Syariah agar selalu berpedoman kepada hukum Islam dalam menyelesaikan masalah yang ada dan jangan sampai keluar dari ketentuan hukum Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan keyakinan meskipun merupakan upaya yang optimal, tetapi masih terdapat kekurangan serta kelemahan dalam penulisan dari berbagai segi. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis serta para pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan serta kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azizah, Zumrotul. *Sistem Pengelolaan Dana Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemanya*. PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Faqihuddin, Abdullah. *Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Faridh, Miftah. *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh (Studi Kasus Terhadap Penentuan Ta'widh Pada Produk Hasanah Card Di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- Fatwa DSN-MUI NO 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.
- Firdaus, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Ekonom Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005).\
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Hanitjo, Ronny. *Metodolog Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Hasan, A. Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. Bandung: CV. Dipenogoro, 2006.

Hasanudin, Jaih Mubarak. *Fiih Mu’amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Hidayani, Ivan. *Penentuan Ta’widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank BJB KCP Sumedang*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Isi surat perjanjian di Pegadaian Syariah.

Jadurrabb. *al-Ta’wis al-Ittifaqi ‘an ‘Adam Tanfidz al-Iltizam au at-Ta’akhhur fih: Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi’I*. Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jama’I, 2006.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Khasiko Tim. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.

Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Nu’man, Mohamad Hilal. *Implementasi Akad Rahn Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah*. Universitas Islam Bandung: Jurnal Vol. 1 No. 2 Desember 2018.

Nuraeni, Ani. *Ganti Rugi Pada Pembatalan Jual Beli Rumah Pada Bumi Panyawangan Bandung*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKPAI), 2012.
- Rahmawati, dkk, M. Habiburrahim, Yulia. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Sevilla, Consuelo G. Dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. (terj.) Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI. Press, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji. *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R &D*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syufa'at. *"Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam"*. Jurnal Al-Ahkam. vol 23, 2013.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Tri Handayani, Lastuti Abubakar. *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*. Universitas Padjajaran Bandung: Jurnal Vol. 2 No. 1 September 2017.

Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Yaniawati, Rully Indrawan dan Poppy. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Rafika Ditama, 2014.

Zaman, Mariam Darus Badrul. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti, 2001.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Nazariyah al-Dhaman*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998. hlm 87. Di Kutip Melalui Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Erlangga, 2013.

<http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/berita-syariah/555>, Diakses tanggal Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 Pukul 21.23.

<http://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 Pukul 20.07.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nandang Hermawan. Kantor wilayah Pegadaian Syariah Kendal Permai, Pada Tanggal 17 Oktober 2018.

Hasil Wawancara Dengan Nasabah DAS Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2019, Pukul 10.45.

Hasil Wawancara Dengan Nasabah MN Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Januari 2019, Pukul 15.15.

Hasil Wawancara Dengan Nasabah MY Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Kendal, Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2019, Pukul 09.15.

Pedoman Wawancara Pengelola Pegadaian Syariah Kendal Permai

1. Kapan Pegadaian Syariah Kendal Permai mulai beroperasi?
2. Apa saja visi misi nya Pegadaian Syariah Kendal Permai?
3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Kendal Permai?
4. Berapa jumlah karyawan di Pegadaian Syariah Kendal Permai?
5. Berapa jumlah nasabah sampai saat ini di Pegadaian Syariah Kendal Permai?
6. Apa saja produk yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Kendal Permai?
7. Bagaimana proses pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai?
8. Apakah ada nasabah yang melakukan wanprestasi di Pegadaian Syariah Kendal Permai? Dan berapa orang?
9. Apa di Pegadaian Syariah Kendal Permai ada ganti rugi (Ta'widh)?
10. Bagaimana prosesnya dalam pembayaran ganti rugi (Ta'widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai?

Pedoman Wawancara Nasabah Pegadaian Syraiah Kendal Permai

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda melakukan pembiaya produk Amanah?
3. Bagaimana anda terlambat membayar angsuran?
4. Sejak kapan anda melakukan pembiayaan produk Amanah?
5. Berapa kali pernah melakukan keterlambatan?

Wawancara dengan Bapak Nandang Hermawan sebagai pengelola Pegadaian
Syariah Kendal Permai



Wawancara dengan DAS sebagai nasabah Pegadaian Syariah Kendal Permai



Wawancara dengan MN sebagai nasabah Pegadaian Syariah Kendal Permai



Wawancara dengan MY sebagai nasabah Pegadaian Syariah Kendal Permai





Nomor : 905/00750.04/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Urgensi : SS

Semarang, 17 Desember 2018

Kepada Ykh,
Wakil Dekan Bid Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas Syari'ah dan Hukum
di
SEMARANG

Perihal : Ijin penelitian untuk penulisan skripsi di PT Pegadaian (Persero)

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : B-2758/Un.10.1/D1/TL.01/9/2018 tanggal 24 September 2018 Perihal Ijin Penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) pada Produk Arrum Haji Melalui Akad Rahn" di Kantor Cabang Syariah Kaligarang untuk mahasiswa sebagai berikut :

| No | Nama | NIM | Program Studi |
|----|----------------|------------|------------------------|
| 1. | Nika Rahmawati | 1402036108 | Hukum ekonomi Syari'ah |

Pada prinsipnya kami memberikan ijin bagi mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (Magang) di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Kaligarang, selama 2 (dua) minggu tmt tanggal 02 sd 12 Januari 2019, pada unit pegadaian yang ditentukan oleh Senior Manager Cabang yang bersangkutan.

Adapun persyaratan dan ketentuan dalam menjalankan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan menyerahkan fotocopy kartu mahasiswa atau yang setara dan menunjukkan aslinya.
2. Memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan riset/penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Universitas Diponegoro.
3. Memiliki surat pengantar atau surat permohonan riset/penelitian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Universitas Diponegoro.

PT PEGADAIAN (Persero)_Area Semarang
Jln. Sidodadi Barat No. 2A, Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax : 024. 7658 5133
Email : deputybisnis.semarang@pegadaian.co.id

4. Sebelum melaksanakan riset/penelitian mahasiswa diwajibkan mendownload aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Playstore dan menggunakan salah satu produk Pegadaian serta menyerahkan buktinya kepada pejabat berwenang di PT Pegadaian (Persero).
5. Menyerahkan 1 (satu) copy Laporan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang sudah disetujui oleh PT Pegadaian (Persero) sebagai hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.
6. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (Magang), mahasiswa harus menaati seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero).

Demikian surat ijin ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab. Terimakasih.

PT Pegadaian (Persero)
Vice President Bisnis Area Semarang



ADE YAYAT
NIK.P.79357

Tembusan :

1. Senior Vice President XI Semarang di Semarang.
2. Senior Manager Cabang Syariah Kaligarang di Semarang.

PT PEGADAIAN (Persero)_Area Semarang
Jln. Sidodadi Barat No. 2A, Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax : 024. 7658 5133
Email : deputybisnis.semarang@pegadaian.co.id

AFSP

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(Surat Al-Maidah: 1, Asy-Syu'ara: 181)

AKAD RAHN TASJILY PADA PEGADAIAN AMANAH
Nomor : 8035218150000010 / AMANAH / Januari / 2018



Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang UPS KENDAL PERMAI, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama MARMIL, SIP, Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah UPS KENDAL PERMAI, untuk selanjutnya disebut MURTAHIN.

II. Nama : PAS
Alamat : [REDACTED] KodePOS [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]
Kotamadya/Kabupaten KENDAL Provinsi JAWA TENGAH
No. Telp : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN

MURTAHIN dan RAHIN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan fasilitas Pinjaman Amanah kepada MURTAHIN untuk membeli kendaraan bermotor dan MURTAHIN setuju untuk memberikannya kepada RAHIN.
- Bahwa RAHIN menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan Pinjaman Amanah kepada MURTAHIN dengan jangka waktu dan Biaya Pemeliharaan Jaminan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, MURTAHIN memberikan izin kepada RAHIN untuk memanfaatkan kendaraan bermotor yang telah digadaikan dan RAHIN bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh MURTAHIN, kendaraan bermotor tersebut harus berada di tempat tinggal atau penyimpanan RAHIN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Pinjaman Amanah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah Pinjaman dan Tujuan

(1) MURTAHIN memberikan fasilitas Pinjaman Amanah kepada RAHIN untuk pembelian kendaraan bermotor dengan identitas:

a. Jenis : SEPEDA MOTOR
b. Merk : HONDA
c. Tahun : 2015
d. Warna : HITAM
e. No. Rangka : MH1JFP113FK328846
f. No. Mesin : JFP1E1325342
g. No. Polisi* : H6952ACD
h. No. BPKB* : MO02716131

(2) RAHIN dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada MURTAHIN untuk membayar hutang atas Pinjaman Amanah yang telah diterima dan digunakan oleh RAHIN serta Biaya Pemeliharaan Jaminan kendaraan

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|
| (a) Hutang atas Pinjaman | : | 10,500,000.00 | + |
| (b) Biaya Pemeliharaan | : | 2,534,760.00 | + |
| Jumlah | : | Rp. 13,034,760.00 | |

*Khusus kendaraan baru, sehubungan dengan pengurusan STNK, no.polisi dan BPKB masih dalam proses di Polres/Samsat, maka pengisian identitasnya dilakukan menyusul yang dituangkan dalam lampiran akad ini, di mana lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Pasal 2

Jangka Waktu

Pinjaman Amanah diberikan untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 (jatuh tempo).

- (2) Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir RAHIN dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus.

Pasal 3

Biaya - biaya

Atas timbulnya Pinjaman Amanah ini, RAHIN diwajibkan membayar biaya-biaya setelah akad ini ditandatangani dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Proses sebesar 239,050.00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- b. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun (barang jaminan), biaya pemblokiran BPKB maupun membuka blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman.
- c. Ganti Rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif ganti rugi diatur dalam Pasal 5 Akad ini.

Pasal 4

Pembayaran

- (1) RAHIN mengaku telah berhutang atas pokok pinjaman ditambah Biaya Pemeliharaan Jaminan serta Ganti Rugi (jika ada) kepada MURTAHIN dan berkewajiban membayar pelunasan terhadap hutang tersebut dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.
- (2) Besarnya angsuran bulanan ditetapkan sebesar Rp 544,000.00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal 18 (delapan belas).
- (4) Pembayaran dilakukan oleh RAHIN kepada MURTAHIN.
- (5) Atau pembayaran dapat dikoordinir oleh Bendahara/Juru Bayar perusahaan dimana RAHIN terdaftar sebagai pegawai tetap, dengan menerapkan metode sistem potong gaji.
- (6) Untuk pembayaran yang dikoordinir oleh Bendahara/Juru Bayar perusahaan dimana RAHIN terdaftar sebagai pegawai tetap, RAHIN bertanggungjawab terhadap setiap kelalaian dan kesalahan dari Bendahara/Juru Bayar tersebut.
- (7) Untuk pembayaran yang dikoordinir oleh Bendahara/Juru Bayar, RAHIN dengan ini memberi kuasa penuh kepada Bendahara/Juru Bayar untuk memotong gaji secara langsung/otomatis setiap bulannya sebesar jumlah angsuran dan kewajiban lain RAHIN kepada MURTAHIN.
- (8) Apabila tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (9) Dalam hal angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka RAHIN dikenakan Ganti Rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan Pasal 5 Akad ini.
- (10) RAHIN diperkenankan melunasi seluruh hutangnya sebelum masa jatuh tempo dengan tanpa mengurangi kewajiban RAHIN.
- (11) MURTAHIN wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan kepada RAHIN apabila kewajiban RAHIN telah lunas.

Pasal 5

Ganti Rugi Keterlambatan

- (1) Apabila RAHIN tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan Ganti Rugi yang besarnya seperti pada ayat (2) pasal ini.
- (2) Setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Ganti Rugi (ta'widh) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran.

Pasal 6

Jaminan Pinjaman

Bila hutang Pinjaman Amanah kepada MURTAHIN belum lunas, maka objek Pinjaman Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijadikan sebagai jaminan (agunan) dimana perikatan jaminannya dilakukan secara fidusia. Objek Pinjaman Amanah berada di tangan RAHIN sedangkan bukti kepemilikan (BPKB) berada di bawah penguasaan MURTAHIN sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang menjadi objek Pinjaman Amanah.
- (3) Apabila barang jaminan (objek Pinjaman Amanah) hilang dan/atau rusak maka tidak mengurangi kewajiban RAHIN kepada MURTAHIN.
- (4) Apabila RAHIN melakukan wanprestasi/cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, maka MURTAHIN berhak melakukan sita/eksekusi barang jaminan.

Pasal 7

Pemeliharaan Marhun

- (1) Barang Jaminan Kendaraan Bermotor disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh RAHIN dan RAHIN bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh MURTAHIN, barang jaminan tersebut harus berada di tempat tinggal atau penyimpanan RAHIN.
- (2) Barang Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas, dimana MURTAHIN berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan RAHIN setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (3) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, RAHIN harus memberitahukan kepada MURTAHIN.
- (4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab RAHIN.
- (5) Bilamana terjadi kepailitan RAHIN wajib memberitahukan pada MURTAHIN dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang status barang sebagai objek jaminan pinjaman pada MURTAHIN.

Pasal 8

Cidera Janji

- (1) RAHIN dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila RAHIN melakukan tindakan salah satu diantara 4 (empat) hal sebagai berikut:
 - (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
 - (b) Sampai dengan jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
 - (c) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan MURTAHIN.
 - (d) RAHIN mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Tetap.
- (2) Bilamana RAHIN melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka MURTAHIN diberikan kuasa oleh RAHIN untuk mengambil alih objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini yang berada di bawah kekuasaan RAHIN dan RAHIN wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat kepada MURTAHIN dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang RAHIN kepada MURTAHIN.

Pasal 9

Larangan dan Sanksi

- (1) RAHIN dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada MURTAHIN.
- (2) Selama akad pinjaman belum berakhir, RAHIN dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan pinjaman atau pinjaman kepada pihak lain.

... terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal ... pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

... Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka MURTAHIN berhak untuk mengakhiri akad pinjaman, dan RAHIN berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada MURTAHIN.



Pasal 10

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan/atau kebakaran, huru-hara yang mengakibatkan Objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan menjadi musnah/rusak berat, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian tanpa mengurangi kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana tercantum dalam Akad ini.

Pasal 11

Esekusi

- (1) Apabila RAHIN cidera janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dan MURTAHIN telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, MURTAHIN melaksanakan eksekusi (jual paksa/melelang) barang jaminan di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK MURTAHIN atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan RAHIN atas Objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan hutang dalam akad ini.
- (2) Hasil penjualan objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN kepada MURTAHIN.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek Pinjaman Amanah menjadi beban RAHIN dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.
- (4) Apabila hasil penjualan objek Pinjaman Amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab RAHIN dan harus dilunasi pada saat itu juga.
- (5) Kelebihan dari hasil penjualan/melelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban RAHIN, menjadi hak RAHIN selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/melelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini RAHIN setuju memberikan kuasa melalui MURTAHIN untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat.

Pasal 12

Masa Berlaku

- (1) Akad pinjaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kewajiban RAHIN.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri Akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Bila RAHIN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka MURTAHIN berhak secara sepihak menyatakan pengakhiran akad pinjaman ini pada saat itu juga dengan hak untuk menarik dan menjual/melelang barang jaminan dimaksud sebagai pelunasan hutang.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini.

Pasal 13

Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh RAHIN kepada MURTAHIN dalam rangka pelaksanaan akad ini termasuk pengakhiran akad adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini, yang tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata.

Pasal 14
Addendum

yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad pinjaman ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.

Pasal 16
Penutup

Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. Satu lembar asli untuk MURTAHIN dan satu lembar asli untuk RAHIN.



MURTAHIN
Pemimpin Cabang,

MARML SIP
P77188

Mengetahui/Menyetujui
(istri/Suami)

A handwritten signature, likely of the wife or husband, is written below the text.

WAARMERKING

Dibukukan dan didaftarkan dalam buku daftar khusus yang disediakan untuk keperluan itu, pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Januari 2018, di bawah Nomor: 2108/ W/ Not-NE/ I/ 2018

Kendal, 23 Januari 2018

Notaris di Kendal,



NANIK ERNAWATI, SH, M Ka

REKENING KORAN

PT PEGADAIAN (Persero)

Cabang : UPS KENDAL PERMAI

KOMPLEKS RUKO KENDAL PERMAI BLOK 10
RT/RW: 00/00 Kodepos 51311 Kelurahan
PATUKANGAN Kecamatan KENDAL
Kotamedya/Kabupaten KENDAL Provinsi JAWA
TENGAH

No Rekening : 6035218150000010

No CIF : 9100254165

Nama : XXXXXXXXXX D A S

Periode : 01-01-2015 s/d 11-01-2019

| Tanggal | Keterangan | Mutasi Debet | Mutasi Kredit | Saldo |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | 0.00 |
| 18-01-2018 | Pencarian Mikro Syariah | 10,500,000.00 | 0.00 | -10,500,000.00 |
| 18-02-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 1 | 0.00 | 438,385.00 | -10,061,615.00 |
| 28-02-2018 | Pembayaran Tunggalan | 105,615.00 | 0.00 | -10,167,230.00 |
| 28-02-2018 | Pembayaran Tunggalan | 438,385.00 | 0.00 | -10,605,615.00 |
| 28-02-2018 | Pembayaran Tunggalan | 7,254.00 | 0.00 | -10,612,869.00 |
| 28-02-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 551,254.00 | -10,061,615.00 |
| 18-03-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 2 | 0.00 | 438,385.00 | -9,623,230.00 |
| 18-03-2018 | Pembayaran Tunggalan | 148.00 | 0.00 | -9,623,378.00 |
| 18-03-2018 | Pembayaran Tunggalan | 601.00 | 0.00 | -9,623,979.00 |
| 18-03-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 748.00 | -9,623,230.00 |
| 02-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 105,470.00 | 0.00 | -9,728,700.00 |
| 02-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 437,784.00 | 0.00 | -10,166,484.00 |
| 02-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 10,866.00 | 0.00 | -10,177,350.00 |
| 02-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 554,120.00 | -9,623,230.00 |
| 18-04-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 3 | 0.00 | 438,385.00 | -9,184,845.00 |
| 30-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 105,615.00 | 0.00 | -9,290,460.00 |
| 30-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 438,385.00 | 0.00 | -9,728,845.00 |
| 30-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 8,704.00 | 0.00 | -9,737,549.00 |
| 30-04-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 552,704.00 | -9,184,845.00 |
| 18-05-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 4 | 0.00 | 438,385.00 | -8,746,460.00 |
| 18-05-2018 | Pembayaran Tunggalan | 58.00 | 0.00 | -8,746,518.00 |
| 18-05-2018 | Pembayaran Tunggalan | 238.00 | 0.00 | -8,746,756.00 |
| 18-05-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 296.00 | -8,746,460.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 105,557.00 | 0.00 | -8,852,017.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 438,147.00 | 0.00 | -9,290,164.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 14,499.00 | 0.00 | -9,304,663.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 558,203.00 | -8,746,460.00 |
| 18-06-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 5 | 0.00 | 438,385.00 | -8,308,075.00 |
| 30-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 105,615.00 | 0.00 | -8,413,690.00 |

REKENING KORAN

PT PEGADAIAN (Persero)

Cabang : UPS KENDAL PERMAI

KOMPLEKS RUKO KENDAL PERMAI BLOK 10

RT/RW: 00/00 Kodepos 51311 Kalurahan

PATUKANGAN Kecamatan KENDAL

Kotamadya/Kabupaten KENDAL Provinsi JAWA

TENGAH

No Rekening : 6035218150000036

No CIF : 6000049439

Nama : XXXXXXXXXX MN

Periode : 01-12-2017 s/d 03-01-2018

| Tanggal | Keterangan | Mutasi Debet | Mutasi Kredit | Saldo |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | 0.00 |
| 02-04-2018 | Pencairan Mikro Syariah | 50,000,000.00 | 0.00 | -50,000,000.00 |
| 02-05-2018 | Pembayaran Angsuran Angs. Ke 1 | 501,694.00 | 0.00 | -50,501,694.00 |
| 02-05-2018 | Pembayaran Angsuran Angs. Ke 1 | 0.00 | 1,881,000.00 | -48,620,694.00 |
| 02-06-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 2 | 0.00 | 1,389,306.00 | -47,231,388.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 501,694.00 ✓ | 0.00 | -47,733,082.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 1,389,306.00 ✓ | 0.00 | -49,122,388.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 12,607.00 ✓ | 0.00 | -49,134,995.00 |
| 07-06-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 1,903,607.00 | -47,231,388.00 |
| 02-07-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 3 | 0.00 | 1,389,306.00 | -45,842,082.00 |
| 13-07-2018 | Pembayaran Tunggalan | 501,694.00 | 0.00 | -46,343,776.00 |
| 13-07-2018 | Pembayaran Tunggalan | 1,389,306.00 | 0.00 | -47,733,082.00 |
| 13-07-2018 | Pembayaran Tunggalan | 27,735.00 | 0.00 | -47,760,817.00 |
| 13-07-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 1,918,735.00 | -45,842,082.00 |
| 02-08-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 4 | 0.00 | 1,389,306.00 | -44,452,776.00 |
| 02-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 71.00 | 0.00 | -44,452,847.00 |
| 02-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 194.00 | 0.00 | -44,453,041.00 |
| 02-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 285.00 | -44,452,756.00 |
| 11-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 501,623.00 | 0.00 | -44,954,379.00 |
| 11-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 1,389,112.00 | 0.00 | -46,343,491.00 |
| 11-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 22,689.00 | 0.00 | -46,366,180.00 |
| 11-08-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 1,913,424.00 | -44,452,756.00 |
| 02-09-2018 | Pembentukan Tunggalan POKOK Angs. Ke 5 | 0.00 | 1,389,306.00 | -43,063,470.00 |
| 02-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 288.00 | 0.00 | -43,063,758.00 |
| 02-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 790.00 | 0.00 | -43,064,548.00 |
| 02-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 1,076.00 | -43,063,470.00 |
| 06-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 501,408.00 | 0.00 | -43,564,878.00 |
| 06-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 1,388,516.00 | 0.00 | -44,953,394.00 |
| 06-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 10,980.00 | 0.00 | -44,964,374.00 |
| 06-09-2018 | Pembayaran Tunggalan | 0.00 | 1,900,004.00 | -43,063,470.00 |

REKENERING KORAN

PT PEGADAIAN (Persero)

Cabang : UPS KENDAL PERMAI

KOMPLEKS RUKO KENDAL PERMAI BLOK 10
RT/RW: 00/00 Kodepos 51311 Kelurahan
PATUKANGAN Kecamatan KENDAL
Kotamedya/Kabupaten KENDAL Provinsi JAWA
TENGAH

No Rekening : 8035216150000014

No CIF : 6000557625

Nama : ~~PT PEGADAIAN~~ MY

Periode : 01-01-2015 s/d 11-01-2019

| Tanggal | Keterangan | Mutasi Debet | Mutasi Kredit | Saldo |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | 0.00 |
| 30-12-2016 | Pencairan Mikro Syariah | 13,000,000.00 | 0.00 | -13,000,000.00 |
| 00-01-2017 | Pembayaran Angsuran Angs. Ke 1 | 140,400.00 | 0.00 | -13,140,400.00 |
| 30-01-2017 | Pembayaran Angsuran Angs. Ke 1 | 0.00 | 683,000.00 | -12,457,400.00 |
| 26-02-2017 | Pembentukan Tunggakan POKOK Angs. Ke 2 | 0.00 | 542,800.00 | -11,914,600.00 |
| 14-03-2017 | Pembayaran Tunggakan | 140,400.00 | 0.00 | -12,055,000.00 |
| 14-03-2017 | Pembayaran Tunggakan | 542,800.00 | 0.00 | -12,597,800.00 |
| 14-03-2017 | Pembayaran Tunggakan | 12,750.00 | 0.00 | -12,610,550.00 |
| 14-03-2017 | Pembayaran Tunggakan | 0.00 | 895,750.00 | -11,914,800.00 |
| 30-03-2017 | Pembentukan Tunggakan POKOK Angs. Ke 3 | 0.00 | 542,800.00 | -11,372,000.00 |
| 26-04-2017 | Pembayaran Tunggakan | 140,400.00 | 0.00 | -11,512,600.00 |
| 26-04-2017 | Pembayaran Tunggakan | 542,800.00 | 0.00 | -12,055,200.00 |
| 26-04-2017 | Pembayaran Tunggakan | 26,410.00 | 0.00 | -12,081,610.00 |
| 26-04-2017 | Pembayaran Tunggakan | 0.00 | 709,410.00 | -11,372,200.00 |
| 30-04-2017 | Pembayaran Angsuran Angs. Ke 4 | 140,400.00 | 0.00 | -11,512,600.00 |
| 30-04-2017 | Pembayaran Angsuran Angs. Ke 4 | 0.00 | 683,000.00 | -10,829,600.00 |
| 30-05-2017 | Pembentukan Tunggakan POKOK Angs. Ke 5 | 0.00 | 542,600.00 | -10,287,000.00 |
| 22-06-2017 | Pembayaran Tunggakan | 140,400.00 | 0.00 | -10,427,400.00 |
| 22-06-2017 | Pembayaran Tunggakan | 542,600.00 | 0.00 | -10,970,000.00 |
| 22-06-2017 | Pembayaran Tunggakan | 20,946.00 | 0.00 | -10,990,946.00 |
| 22-06-2017 | Pembayaran Tunggakan | 0.00 | 703,946.00 | -10,287,000.00 |
| 30-06-2017 | Pembentukan Tunggakan POKOK Angs. Ke 6 | 0.00 | 542,600.00 | -9,744,400.00 |
| 30-07-2017 | Pembentukan Tunggakan POKOK Angs. Ke 7 | 0.00 | 542,600.00 | -9,201,800.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 140,400.00 | 0.00 | -9,342,200.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 542,600.00 | 0.00 | -9,884,800.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 27,320.00 | 0.00 | -9,912,120.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 140,400.00 | 0.00 | -10,052,520.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 542,600.00 | 0.00 | -10,595,120.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 18,948.00 | 0.00 | -10,605,138.00 |
| 10-08-2017 | Pembayaran Tunggakan | 0.00 | 1,403,338.00 | -9,201,800.00 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nika Rahmawati
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 5 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sekopek Kulon RT 004/002, Desa Sarirejo, Kec.
Kaliwungu-Kendal

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri 2 Sarirejo, lulus tahun 2007
2. Tamat SMP Negeri 3 Kaliwungu, lulus tahun 2010
3. Tamat SMK Bina Utama Kendal, lulus tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2019

Yang membuat,

Nika Rahmawati
NIM. 1402036087